

**PENGARUH OPINI, TEMUAN AUDIT, KEMANDIRIAN DAN UKURAN  
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2010-2014**

**(Skripsi)**

Oleh  
**HUBERT SIJABAT**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

## **ABSTRACT**

### **THE EFFECT OF OPINION, AUDIT FINDINGS, INDEPENDENCE LEVEL AND SIZE TO PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENT IN INDONESIA YEAR 2010-2014**

**By**

**HUBERT SIJABAT**

This study aims to provide empirical evidence on effect of opinion, audit findings, independence level and local government size to score the performance of local government in Indonesia year 2010-2014. Local government performance is measured by scores on the evaluation of local government performance (EKPPD) derived from local government organizers report (LPPD).

The method used in this study is multiple regression with panel data and fixed effect model to the 33 province during 2010-2014. this study provides evidence that the audit opinion and size have positive effect on local government performance, while audit findings have negative effect on local government performance. Independence level has no significant effect to the performance of local government in Indonesia.

**Keywords: local government performance report, evaluation of local government performance, opinion, audit findings, independence level, size of local government.**

## **ABSTRAK**

### **PENGARUH OPINI, TEMUAN AUDIT, KEMANDIRIAN DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2010-2014**

Oleh

**HUBERT SIJABAT**

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh opini, temuan audit, kemandirian dan ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia Tahun 2010-2014. Kinerja pemerintah daerah diukur dengan skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah (EKPPD) melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah regresi berganda data panel dengan model efek tetap terhadap 33 provinsi pada periode Tahun 2010-2014. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa opini audit dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, sementara temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Tingkat kemandirian tidak berpengaruh signifikan terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia.

**Kata Kunci: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD),  
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  
(EKPPD), opini audit, temuan audit, kemandirian, ukuran  
pemerintah daerah.**

PENGARUH OPINI, TEMUAN AUDIT, KEMANDIRIAN DAN UKURAN  
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2010-2014

Oleh  
HUBERT SIJABAT

Skripsi  
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA EKONOMI  
pada  
Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

Judul Skripsi

**: PENGARUH OPINI, TEMUAN AUDIT,  
KEMANDIRIAN DAN UKURAN  
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP  
KINERJA PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA  
TAHUN 2010-2014**

Nama Mahasiswa

**: Hubert Sijabat**

Nomor Pokok Mahasiswa

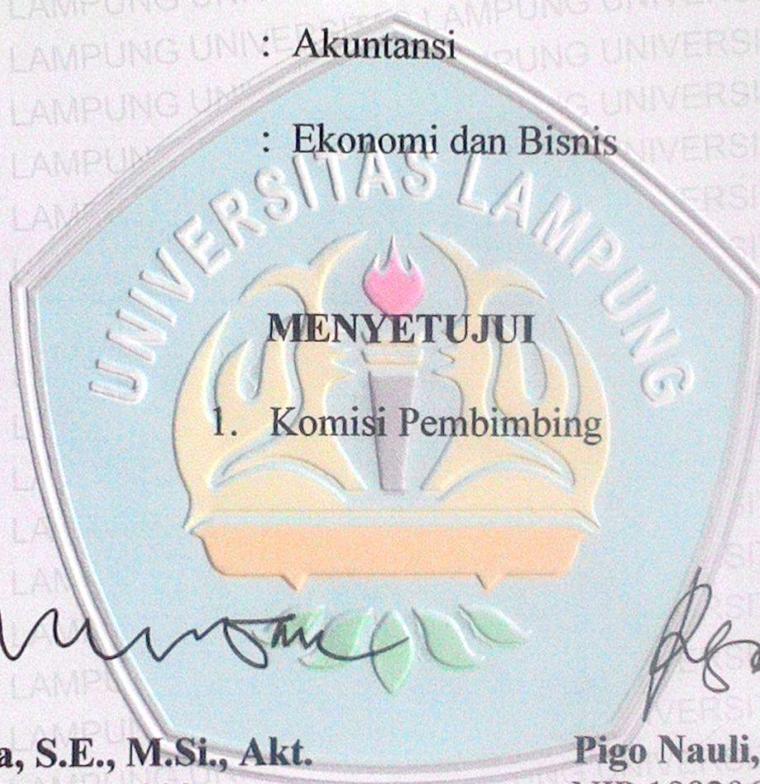
**: 1411031139**

Program Studi

**: Akuntansi**

Fakultas

**: Ekonomi dan Bisnis**



**Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt.**

**NIP 19560620 198603 1 003**

**Pigo Nauli, S.E., M.Sc.**

**NIP 19820623 200812 1 001**

**MENGETAHUI**

**2. Ketua Jurusan Akuntansi**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Farichah", written over a horizontal line.

**Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.**

**NIP 19620612 199010 2 001**

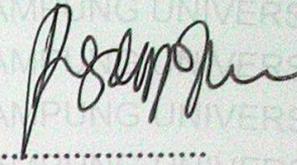
**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

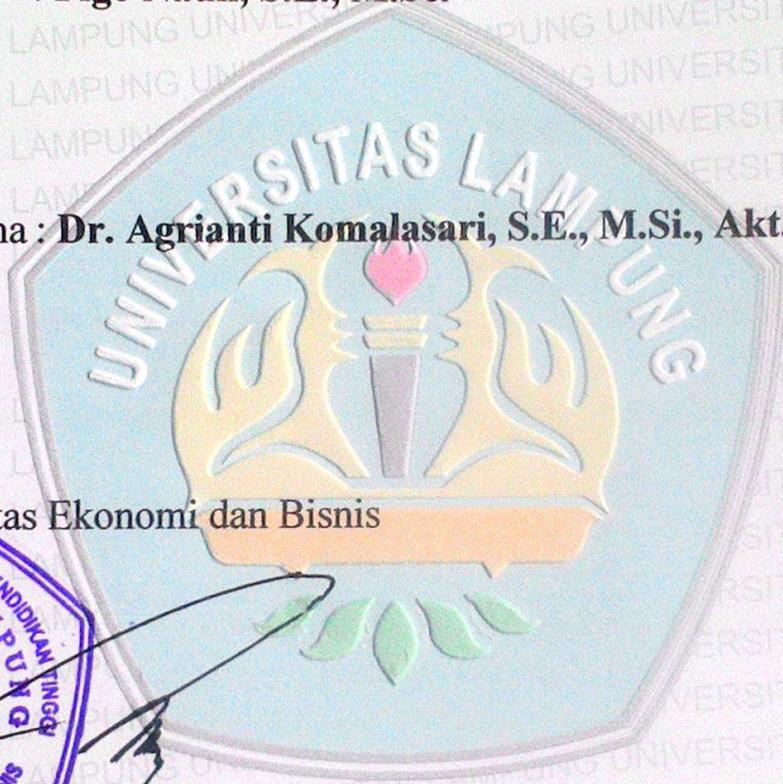
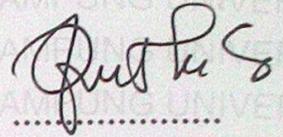
**Ketua : Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt.**



**Sekretaris : Pigo Nauli, S.E., M.Sc.**



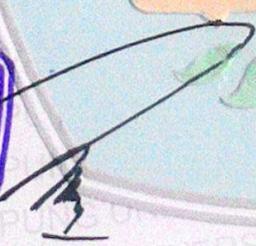
**Penguji Utama : Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt.**



**2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**



**Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.**  
NIP 19610904 198703 1 011



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 2 November 2016**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : Hubert Sijabat**

**NPM : 1411031139**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul "Pengaruh Opini, Temuan Audit, Kemandirian dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2014" beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan bukan merupakan plagiarisme, pencurian hasil karya milik orang lain, ataupun hasil kerja keras orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 2 November 2016

Yang Membuat Pernyataan,



Hubert Sijabat

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis lahir pada tanggal 26 Agustus 1986 di Desa Silaumalela, Kabupaten Simalungun sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Benedict Sijabat dan Johanna Siagian.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 091267 Kabupaten Simalungun pada tahun 1999. Selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan menengah pertama di SMP Katolik Asisi Pematang Siantar pada tahun 2002 dan pendidikan menengah atas di SMA Katolik Budi Mulia Pematang Siantar pada tahun 2005. Selanjutnya, penulis diterima dan menyelesaikan pendidikan Program Diploma III (D-III) di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Jakarta pada tahun 2008. Penulis mulai bekerja sebagai Auditor Pelaksana di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara sejak tahun 2010 sampai dengan 2014.

Selanjutnya Penulis menerima beasiswa program STAR (*State Accountability Revitalization*) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung untuk pendidikan Program Strata 1 (S-1) jurusan Akuntansi pada tahun 2014. Dan pada tahun 2016, penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Lampung.

## SANWACANA

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan anugerah dan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Opini, Temuan Audit, Kemandirian dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2014”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi S1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi.
4. Bapak Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt., selaku dosen Pembimbing Utama sekaligus Pembimbing Akademik, atas bimbingan, pengetahuan, pengalaman, motivasi, serta masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Pigo Nauli, S.E., M.Sc., selaku Pembimbing Pendamping atas bimbingan, pengetahuan, nasihat, dukungan, pelajaran, pengalaman, serta pembelajaran diri yang telah diberikan.

6. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt. selaku Penguji Utama atas masukan, arahan, dan nasihat yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan di Jurusan Akuntansi atas semua bimbingan, pengajaran, pelayanan dan bantuan yang telah diberikan.
8. Kedua orang tua, Bapak Benedict Sijabat dan Ibu Johanna Siagian yang tidak pernah berhenti memanjatkan doa serta selalu memberikan, nasihat, dan dukungan dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.
9. Kedua kakak, Imelda Sijabat dan Ambrosius Sijabat yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan untuk menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan, STAR BPKP *batch* 1 angkatan 2014; Dian Margi Putra Asmorojati, Ersya Resya Ranilhaj, Mujiyanto, Ilham Irawan Romadhoni, Rendy Bayu Adha, Irwansyah Adnansaid, Raden Hepzi Irawan, Benny Tibestri Siallagan, Janson Yanda Hutaaruk dan Toni Pebriansya, atas kebersamaan, bantuan dan dukungan kalian selama menjalani perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Demikianlah, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan baru bagi setiap orang yang membacanya.

Bandar Lampung, 2 November 2016  
Penulis,

Hubert Sijabat

## DAFTAR ISI

Halaman

### DAFTAR ISI

### DAFTAR TABEL

### DAFTAR GAMBAR

### DAFTAR LAMPIRAN

#### I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Agensi ( <i>Agency Theory</i> ).....	8
2.2 Akuntabilitas dan <i>Good Governance</i> .....	10
2.3 Otonomi Daerah dan Desentralisasi.....	11
2.4 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	12
2.5 Pemeriksaan Keuangan Daerah .....	13
2.6 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	16
2.7 Defenisi Kinerja dan Pengukuran Kinerja.....	18
2.8 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .....	19
2.9 Tingkat Kemandirian dan Ukuran Pemerintah Daerah.....	22
2.10 Penelitian Terdahulu .....	23
2.11 Hipotesis Penelitian.....	25
2.11.1 Pengaruh Opini Audit terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .....	25
2.11.2 Pengaruh Temuan Audit terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	26
2.11.3 Pengaruh Kemandirian Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .....	26
2.11.4 Pengaruh Ukuran Pemerintah daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	27

#### III. METODE PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Objek .....	29
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	29
3.3 Ruang Lingkup Penelitian .....	30

3.4	Variabel Penelitian.....	31
3.4.1	Variabel Dependen.....	31
3.4.2	Variabel Independen.....	31
3.5	Model Penelitian.....	33
3.6	Metode Analisis.....	34
3.6.1	Analisis Regresi.....	34
3.6.2	Uji Asumsi Klasik.....	36
3.6.3	Pengujian Hipotesis.....	38

#### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1	Statistik Deskriptif.....	41
4.2	Hasil Penelitian.....	44
4.2.1	Pemilihan Model Regresi.....	44
4.2.1.1	Uji Chow.....	44
4.2.1.2	Uji Hausman.....	45
4.2.2	Uji Asumsi Klasik.....	46
4.2.2.1	Uji Normalitas.....	46
4.2.2.2	Uji Autokorelasi.....	47
4.2.2.3	Uji Multikolinieritas.....	47
4.2.2.4	Uji Heteroskedastisitas.....	48
4.2.3	Pengujian Hipotesis.....	49
4.2.3.1	Estimasi Model Regresi Data Panel.....	49
4.2.3.2	Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	49
4.2.3.3	Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t).....	50
4.2.3.4	Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	51
4.3	Pembahasan.....	51
4.3.1	Pengaruh Opini Audit Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	51
4.3.2	Pengaruh Temuan Audit Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	52
4.3.3	Pengaruh Kemandirian Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	53
4.3.4	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	53
4.4	Analisis Diskriminan.....	54
4.4.1	<i>Test of Equality of Group Means</i> .....	54
4.4.2	Koefisien Determinasi.....	55
4.4.3	Pengujian Hipotesis.....	56

#### **V. SIMPULAN DAN SARAN**

5.1	Simpulan.....	59
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	60
5.3	Saran.....	61

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
2.1	Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian, dan Kemampuan Keuangan Daerah .....	25
3.1	Ringkasan Variabel Penelitian .....	37
4.1	Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	41
4.2	Hasil Uji Chow .....	45
4.3	Hasil Uji Hausman.....	45
4.4	Rentang Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson.....	47
4.5	Matriks Korelasi Antar Variabel Bebas .....	48
4.6	Nilai Probabilitas Variabel Bebas Berdasarkan Uji <i>Glesjer</i> .....	48
4.7	Hasil Regresi Data Panel Model <i>Fixed Effect</i> .....	49
4.8	Hasil Uji t .....	50
4.9	<i>Test of Equality of Group Means</i> .....	55
4.10	<i>Eigenvalues</i> .....	55
4.11	<i>Variables Entered/Removed</i> .....	56
4.12	<i>Canonical Discriminant Function Coefficients</i> .....	56

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
3.1 Kerangka Penelitian.....	34
4.1 Skor Kinerja Pemerintah Daerah.....	42
4.2 Hasil Uji Normalitas .....	46

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah demi meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan keunggulan daerah.

Pemerintahan daerah diselenggarakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahannya agar tercapai otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien. Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat.

Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada publik serta sebagai wujud penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. LPPD mencakup informasi-informasi yang memadai dan akurat atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Ruang lingkup LPPD meliputi penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan.

Melalui LPPD, Kemendagri melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bentuk evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD). Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa informasi yang tertuang dalam LPPD digunakan oleh pemerintah pusat sebagai bahan acuan untuk menilai kinerja setiap pemda. EKPPD menggunakan LPPD sebagai sumber informasi utama yang difokuskan pada informasi capaian kinerja pada tataran pengambil dan pelaksanaan kebijakan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Hasil dari EKPPD tersebut berupa laporan hasil evaluasi pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibuat dalam bentuk skor secara nasional.

Kewajiban pemerintah daerah lainnya diatur dalam Undang-undang Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pemerintah daerah wajib menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kinerja keuangan daerah berkaitan erat dengan LPPD karena Pemda harus mencantumkan capaian kinerja keuangan tahun sebelumnya dalam LPPD, meliputi LRA dan Neraca daerah melalui LKPD, Hasil audit BPK terhadap LKPD tersebut serta temuan audit atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan aspek pengambil kebijakan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD) sehingga memiliki kontribusi yang besar dalam perolehan skor EKPPD.

LKPD yang telah disusun oleh pemerintah daerah setiap tahunnya diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menjelaskan bahwa audit merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil audit akan memuat opini audit yang meliputi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Disamping aspek keuangan daerah dan pemeriksaan keuangan daerah, terdapat juga aspek-aspek lainnya yang menjadi bagian dari penilaian kinerja pemerintah daerah (EKPPD), antara lain: ketentraman dan ketertiban umum daerah;

keselarasan dan efektivitas hubungan antar pemerintah dalam rangka pengembangan otonomi daerah; efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD; pengelolaan potensi daerah serta terobosan dan inovasi baru.

Penelitian ini tidak mencakup aspek-aspek tersebut karena hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah (EKPPD) yang dipublikasikan hanya berupa pemeringkatan dan skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Selain variabel opini dan temuan audit, peneliti juga akan menguji pengaruh tingkat kemandirian dan ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahannya. variabel kemandirian diukur dengan proksi nilai PAD dibagi total pendapatan yang diterima daerah, sedangkan variabel ukuran pemerintah daerah menggunakan proksi nilai total aset daerah. Semakin tinggi tingkat kemandirian suatu pemda diharapkan dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut. Begitu juga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah juga harus didukung oleh aset yang memadai agar dapat memberikan pelayanan yang baik. Semakin besar ukuran daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah aset pemda, maka diharapkan akan semakin tinggi kinerja pemda tersebut (Mustikarini dan Fitriyasi, 2012).

Penelitian terkait pengaruh opini, temuan audit, tingkat kemandirian serta ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemda belum banyak dilakukan di Indonesia. Mustikarini dan Fitriyasi (2012), Sudarsana dan Raharjo (2013), Pranatiningrum (2012) dan Budianto (2012) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kinerja penyelenggaraan pemda (EKPPD) pada pemda kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ukuran

pemda yang ditandai dengan proksi total aset dan desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan sedangkan temuan audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja pemda. Hasil yang berbeda disimpulkan Sudarsana dan Raharjo (2013) terkait ukuran pemda yakni total aset tidak berpengaruh signifikan terhadap skor kinerja pemda. Budianto (2012) juga menyimpulkan bahwa opini audit dan tingkat kemandirian berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemda. Hal tersebut didukung oleh Li *et al.* (2009) yang menyimpulkan bahwa opini berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya Mangkunegara (2015) menyimpulkan bahwa karakteristik dan hasil pemeriksaan pemda berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Beberapa penelitian terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah yang telah dilakukan hanya menggunakan sampel pemda kabupaten/kota. Penelitian terkait kinerja penyelenggaraan pemda pada tingkat provinsi telah dilakukan Fitriyani dkk (2013), namun hanya meneliti tingkat kesesuaian laporan penyelenggaraan pemerintah daerah pada tahun 2010 terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. Oleh karena itu, penelitian ini juga bermaksud melanjutkan penelitian-penelitian sebelumnya terkait kinerja penyelenggaraan pemda, dengan menganalisis pengaruh opini, temuan audit, tingkat kemandirian serta ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemda pada tingkat provinsi di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai faktor faktor yang mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan dengan judul penelitian “PENGARUH OPINI, TEMUAN AUDIT,

KEMANDIRIAN DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2010-2014”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka beberapa masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Apakah opini audit berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah provinsi di Indonesia?
2. Apakah temuan audit berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah provinsi di Indonesia?
3. Apakah kemandirian pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah provinsi di Indonesia?
4. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah provinsi di Indonesia?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Membuktikan adanya pengaruh opini audit BPK terhadap tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintah provinsi di Indonesia.
2. Membuktikan adanya pengaruh temuan audit BPK terhadap tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintah provinsi di Indonesia.
3. Membuktikan adanya pengaruh kemandirian Pemda terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah provinsi di Indonesia.
4. Membuktikan adanya pengaruh ukuran daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah provinsi di Indonesia.

Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Pemerintah pusat, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pada tingkat provinsi.
2. Pemerintah daerah, penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam meningkatkan kinerja pemerintahannya.
3. Pembaca, memberikan gambaran atas faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada tingkat provinsi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)**

Teori keagenan pada dasarnya merupakan teori yang muncul karena adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Teori ini mengasumsikan bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Adanya pemisahan antara kepemilikan oleh *principal* dengan pengendalian oleh *agent* dalam sebuah organisasi cenderung menimbulkan konflik keagenan diantara *principal* dan *agent*. Di satu sisi, *agent* secara moral bertanggung jawab mengoptimalkan keuntungan *principal*, namun di sisi lain manajemen juga berkepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri, sehingga cenderung menimbulkan masalah agensi (Jensen dan Meckling, 1976).

Pada dasarnya organisasi sektor publik dibangun atas dasar *agency theory*, diakui atau tidak di pemerintahan daerah terdapat hubungan dan masalah keagenan (Halim dan Abdullah, 2006). Lane (2003) berpendapat bahwa teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen. Prinsipal harus memonitor kerja agen, agar tujuan organisasi dapat dicapai

dengan efisien serta tercapainya akuntabilitas publik. Hal yang sama dikemukakan oleh Moe (1984) yang menjelaskan konsep ekonomis organisasi sektor publik dengan menggunakan teori keagenan. Kerangka hubungan prinsipal agen merupakan satu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik.

Mardiasmo (2002) menjelaskan bahwa akuntabilitas dalam konteks sektor publik merupakan kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pernyataan ini mengandung arti bahwa dalam pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan (teori keagenan) antara masyarakat sebagai prinsipal dengan pemerintah daerah sebagai agen.

Teori keagenan pada organisasi pemerintahan berfokus pada persoalan asimetri informasi antara pengelola (agen/pemerintah) dan publik (prinsipal/dewan). Asimetri informasi (*asymmetric information*) merupakan informasi yang tidak seimbang karena perbedaan distribusi informasi antara prinsipal dan agen (Gibaldi, 2001). Setiawan (2013) dalam Sudarsana (2013) beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak prinsipal (masyarakat). Adanya *information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadinya peyelewengan atau korupsi oleh agen. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya sebagai mekanisme *checks and balances* agar dapat mengurangi *information*

*asymmetry*. Dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah, informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah daerah sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan juga menjadi lebih kecil.

## **2.2 Akuntabilitas dan *Good Governance***

Akuntabilitas adalah tentang pemberian suatu laporan tentang apa, bagaimana dan mengapa sumber daya dialokasikan untuk tujuan tertentu, bagaimana kekuasaan dijalankan dan hubungan antara kekuasaan yang dijalankan dengan hasil yang diharapkan dan dicapai (Haning, 2005). Jadi pengertian akuntabilitas tidak hanya sebatas kewajiban terhadap pelaporan hasil kerja, namun mencakup juga pencapaian tujuan dari apa yang dilakukan.

Dari perspektif sistem akuntabilitas, terdapat beberapa karakteristik pokok akuntabilitas yaitu, berfokus pada hasil, menggunakan beberapa indikator yang telah dipilih untuk mengukur kinerja, menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan atas suatu program atau kebijakan, menghasilkan data secara konsisten dari waktu ke waktu, serta melaporkan hasil dan memublikasikannya secara teratur (Sadjiarto, 2000). Konsep akuntabilitas menjadi salah satu karakteristik dalam penerapan *Good Governance* di pemerintahan. Karakteristik *Good Governance* yang dirumuskan dalam deklarasi Manila (Wakhyudi, 2011) meliputi:

- a) **Transparan:** mengindikasikan adanya kebebasan dan kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai bagi mereka yang memerlukan.
- b) **Akuntabel:** semua pihak harus mampu memberikan pertanggungjawaban atas mandat yang diberikan kepadanya.

- c) Adil: terdapat jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan kesempatan yang sama dalam menjalankan kehidupannya.
- d) Wajar: jaminan atas pemerintahan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (standar).
- e) Demokratis: terdapat jaminan kebebasan bagi setiap individu untuk berpendapat/mengeluarkan pendapat serta ikut dalam kegiatan pemilihan umum yang bebas, langsung dan jujur.

Dalam rangka mewujudkan konsep *good governance*, pemerintah daerah harus senantiasa mengedepankan prinsip akuntabilitas yang bukan hanya pada pemenuhan kewajiban pelaporan saja tapi hingga pencapaian hasil yang bermanfaat baik bagi masyarakat yang dilayani.

### **2.3 Otonomi Daerah dan Desentralisasi**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mendefinisikan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan serta peran serta masyarakat. Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah.

Pengertian Desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sasana dalam Pranataningrum (2012) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Mardiasmo (2002) juga menjelaskan bahwa pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- 2) Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah; dan
- 3) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

#### **2.4 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode laporan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan APBD yang dinyatakan dalam bentuk Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD). Pertanggungjawaban atas pengelolaan APBD diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Komponen laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah daerah terdiri dari:

- a) Laporan Realisasi Anggaran
- b) Neraca
- c) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- d) Laporan Operasional
- e) Laporan Perubahan Ekuitas
- f) Laporan Arus Kas
- g) Catatan atas Laporan Keuangan

## **2.5 Pemeriksaan Keuangan Daerah**

Arens (2008) menyatakan bahwa definisi auditing adalah sebagai berikut:

*“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.”*

Dari pernyataan diatas dapat diartikan bahwa audit adalah proses pengumpulan data dan evaluasi bukti untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Pemeriksaan keuangan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara terdiri atas:

- a) Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
- b) Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
- c) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

Selanjutnya menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Opini audit merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Opini didasarkan pada 4 kriteria, yakni:

- 1) Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
- 2) Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);

- 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang–undangan; dan
- 4) Efektivitas sistem pengendalian intern.

Empat jenis pemberian opini oleh BPK antara lain:

- 1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Opini ini menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material dan informasi keuangan dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

- 2) Opini Wajar Dengan Pengecualian

Opini ini menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan yang tidak dikecualikan dalam opini pemeriksa dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

- 3) Opini Tidak Wajar

Opini ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, Sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

- 4) Opini Tidak Memberikan Pendapat

Opini ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan. Dengan kata lain, pemeriksa tidak dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, Sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat

digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

Selain opini audit, Hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD juga memuat temuan audit yang meliputi temuan audit atas sistem pengendalian intern dan temuan audit atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Rincian temuan audit terhadap sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut:

- 1) Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan.
- 2) Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja.
- 3) Kelemahan struktur pengendalian intern.

Sedangkan temuan audit atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terdiri dari lima klasifikasi yakni meliputi:

- 1) Klasifikasi temuan kerugian negara/indikasi kerugian negara.
- 2) Klasifikasi temuan administrasi
- 3) Klasifikasi temuan administrasi
- 4) Klasifikasi temuan kehematan dan efisiensi
- 5) Klasifikasi temuan efektivitas

## **2.6 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat, LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran berdasarkan rencana kerja pembangunan daerah yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah pusat. Ruang lingkup dalam LPPD mencakup

penyelenggaraan:

- a. Urusan desentralisasi;
- b. Tugas pembantuan; dan
- c. Tugas umum pemerintahan.

Urusan desentralisasi meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan-urusan yang dilakukan atas dasar pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan secara bertahap sedangkan urusan pilihan merupakan urusan-urusan yang dilakukan berdasarkan potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan keunggulan masing-masing daerah.

Disamping urusan desentralisasi, ruang lingkup LPPD juga mencakup tugas pembantuan untuk kabupaten/kota meliputi:

- a. Tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah;
- b. Tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah provinsi; dan
- c. Tugas pembantuan kepada desa.

Sedangkan tugas umum pemerintahan meliputi:

- a. Kerjasama antar daerah;
- b. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga;
- c. Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;
- d. Pembinaan batas wilayah;
- e. Pencegahan dan penanggulangan bencana;
- f. Pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah;
- g. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
- h. Tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.

## **2.7 Defenisi Kinerja dan Pengukuran Kinerja**

### **2.7.1 Defenisi Kinerja**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kinerja adalah sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan. Mahsun (2006) menjelaskan definisi kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi. Sedangkan menurut Stephen P Robbin sebagaimana dikutip dalam Sudarsana (2013) kinerja adalah ukuran hasil kerja yang dilakukan dengan menggunakan kriteria yang disetujui bersama.

### **2.7.2 Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja organisasi merupakan komponen penting yang memberikan motivasi dan arah serta umpan balik terhadap efektivitas perencanaan dan pelaksanaan proses perubahan dalam suatu organisasi. Menurut Mardiasmo (2006), Sektor publik tidak bisa lepas dari kepentingan umum sehingga pengukuran kinerja mutlak diperlukan untuk mengetahui seberapa berhasil misi sektor publik tersebut dapat dicapai oleh penyedia jasa dan barang-barang publik. Robertson dalam Mahsun (2006) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan), hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan.

## **2.8 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa salah satu evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah berupa Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).

EKPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pelaksanaan EKPPD harus berdasarkan atas asas :

- a. Spesifik: dilaksanakan dengan khusus dan terperinci.
- b. Objektif: dilaksanakan dengan pengukuran kinerja sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda.
- c. Berkesinambungan: dilaksanakan secara bertahap sehingga terlihat proses penyelenggaraan dari waktu ke waktu.
- d. Terukur: dilaksanakan dengan menggunakan data kuantitatif.
- e. Dapat diperbandingkan: dilaksanakan dengan sistem pengukuran kinerja dan indikator kinerja kunci yang sama untuk semua daerah.
- f. Dapat dipertanggungjawabkan: dilaksanakan dengan mengolah data dari LPPD yang dikirim oleh kepala daerah secara transparan.

Tata cara evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009. Permendagri tersebut menjelaskan bahwa EKPPD menggunakan LPPD sebagai sumber

informasi utama. Selain LPPD, EKPPD juga menggunakan sumber informasi lainnya berupa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Informasi keuangan daerah, laporan kinerja instansi pemerintah daerah, laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan daerah, serta laporan dan/atau informasi lain yang akurat dan jelas penanggungjawabnya.

Sumber informasi sebagaimana dimaksud di atas difokuskan pada informasi capaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan menggunakan indikator kinerja kunci (IKK).

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Indeks capaian kinerja pada aspek tataran pengambil kebijakan meliputi:

- a. Ketentraman dan ketertiban umum daerah;
- b. Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antarpemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah;
- c. Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah;
- d. Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD;
- e. Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan;
- f. Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil;
- g. Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah;

- h. Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD;
- i. Pengelolaan potensi daerah dan terobosan inovasi baru.

Dalam memberikan penilaian terhadap skor EKPPD, metode yang digunakan adalah dengan menilai total indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Total indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut meliputi :

1. Indeks Capaian Kinerja (Bobot 95%)
2. Indeks Kesesuaian Materi (Bobot 5%)

Selanjutnya dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 dijelaskan bahwa tata cara pemberian skor untuk indeks capaian kinerja dan kesesuaian materi meliputi:

- a. Penggabungan pada IKK yang belum ada kriteria tingkat capaian melalui tahapan:
  - 1) Penggabungan IKK;
  - 2) Dilakukan normalisasi data melalui rumus;
  - 3) Dilakukan rata-rata nilai normalisasi; dan
  - 4) Pemberian skor.
- b. Tanpa penggabungan pada IKK yang hanya 1 (satu) isian dari dua pilihan atau menyebutkan banyak daftar atau jumlah yang diisi dari daftar atau jumlah yang ditentukan. Pemberian skor pada masing IKK meliputi:
  - 1)  $> (1,25\% \times \text{rata-rata normalisasi}) = 4$
  - 2)  $> (\text{rata-rata normalisasi})$  sampai dengan 1,25% rata-rata normal =3
  - 3)  $> (0,75\% \times \text{rata-rata normalisasi})$  sampai dengan rata-rata normal =2
  - 4)  $< (0,75\% \times \text{rata-rata normalisasi}) = 1$

Nilai pembobotan (Skor kinerja pemda) tersebut dapat dilihat pada lampiran penelitian ini.

## **2.9 Tingkat Kemandirian dan Ukuran Pemerintah Daerah**

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 bahwa, “Kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri, dalam rangka asas desentralisasi.” Halim (2011) menjelaskan bahwa kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Tingkat kemandirian daerah diukur dengan seberapa besar porsi PAD yang dapat dihasilkan pemda dibandingkan dengan pendapatan total yang diterimanya. PAD merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Semakin besar nilai PAD terhadap total pendapatan menunjukkan semakin mandiri pemda tersebut. Halim (2011) menjelaskan bahwa tingkat kemandirian dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Mahsun (2006) menyusun suatu pola hubungan pemerintah pusat dan daerah serta tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah yang tampak dalam Tabel berikut ini:

**Tabel 3.1**  
**Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian, dan Kemampuan Keuangan Daerah**

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	>25 – 50	Konsultatif
Sedang	>50 – 75	Partisipatif
Tinggi	>75 – 100	Delegatif

Sumber: Mahsun (2006)

Variabel ukuran daerah dalam penelitian ini diproyeksikan dengan nilai total aset yang dimiliki pemerintah daerah tersebut. Pemerintah daerah harus didukung oleh aset yang baik agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Sumber daya dan fasilitas yang memadai sangat diperlukan untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dengan semakin besar nilai aset suatu pemda, maka diharapkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan akan semakin baik pula. Hal ini didukung oleh Sumarjo (2010) yang menyimpulkan bahwa ukuran pemda berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemda kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian lain yang menggunakan variabel ukuran pemda antara lain Mustikarini dan Fitriyani (2012), Mangkunegara (2015) dan Budianto (2012) dengan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa ukuran pemda mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja pemda.

## **2.10 Penelitian Terdahulu**

- a. Penelitian Mustikarini dan Fitriyani (2012) yang menyimpulkan bahwa karakteristik berupa ukuran pemda, tingkat kekayaan, ketergantungan pemerintah pusat berpengaruh positif sedangkan belanja daerah dan temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja pemda.

- b. Penelitian Sudarsana dan Raharjo (2013) yang menyimpulkan bahwa ukuran pemerintah daerah dengan proksi total aset, variabel tingkat ketergantungan daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap skor kinerja pemda kabupaten/kota, sedangkan variabel temuan audit BPK dengan proksi temuan audit dibanding total anggaran belanja, variabel tingkat kekayaan daerah dengan proksi PAD dibanding total pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap skor kinerja pemda kabupaten/kota di Indonesia.
- c. Penelitian Mangkunegara (2015) tentang pengaruh karakteristik keuangan dan hasil pemeriksaan pada kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara yang menyimpulkan bahwa karakteristik berupa ukuran pemda dan hasil pemeriksaan berupa temuan audit berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
- d. Penelitian Budianto (2012) yang menyimpulkan bahwa opini dan gender berpengaruh positif terhadap kinerja pemda; sementara temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja pemda; serta variabel kontrol berupa tingkat kemandirian pemda dan ukuran pemda berpengaruh positif terhadap kinerja pemda. Metode yang digunakan adalah uji regresi linier berganda terhadap 1082 sampel selama tahun anggaran 2008-2010.
- e. Penelitian Pranantaningrum (2012) yang menyimpulkan bahwa rasio desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap kinerja pemda; rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan berpengaruh negatif terhadap kinerja pemda; sementara rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja pemda.
- f. Penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010) terkait pengaruh karakteristik pemda kabupaten/kota terhadap kinerja keuangan pemda tahun 2008. Hasil

penelitian menyimpulkan bahwa ukuran daerah, leverage, dan *intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemda yang dilihat dari rasio efisiensi.

- g. Penelitian Fitriyani dkk (2013) yang menganalisis tingkat kesesuaian laporan penyelenggaraan pemerintah daerah tingkat provinsi tahun 2010 terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. Berdasarkan analisis uji beda rata-rata terhadap 25 LPPD pemda propinsi tahun 2010, tidak terdapat perbedaan yang signifikan atas tingkat pengungkapan LPPD provinsi untuk kategori besarnya aset, tingkat kemandirian, letak wilayah propinsi serta nilai EKPPD.

## **2.11 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan landasan teori dan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dibuat hipotesis penelitian sebagai berikut:

### **2.11.1 Pengaruh Opini Audit Terhadap Kinerja Penyelenggaraan**

#### **Pemerintah Daerah**

Opini audit merupakan indikasi bahwa pelaksanaan akuntabilitas dalam hal pelaporan keuangan telah berjalan dengan baik. Kriteria untuk mendapatkan opini yang baik adalah kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah, efektivitas pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kecukupan pengungkapan. Semakin terpenuhinya kriteria tersebut maka opini yang diperoleh oleh pemerintah daerah akan semakin baik.

Opini yang semakin baik ini diharapkan akan memberikan pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Variabel opini audit terhadap kinerja telah digunakan dalam penelitian Budianto (2012) dan Li *et al.* (2009).

Dari uraian di atas, maka dibuatlah hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

*H1 : Opini audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.*

### **2.11.2 Pengaruh Temuan Audit Terhadap Kinerja Penyelenggaraan**

#### **Pemerintah Daerah**

Sama halnya dengan opini, temuan audit juga dapat mengindikasikan bagaimana akuntabilitas pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangannya, serta bagaimana efektifitas pengendalian intern dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Nilai temuan yang besar dapat memberikan sinyal penyimpangan yang dilakukan pemda, dan sangat mungkin akan mengganggu proses pencapaian target kinerja pemda. Penelitian ini ingin melihat apakah temuan audit berkaitan erat dengan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Penelitian terdahulu yang menghubungkan temuan audit dengan skor kinerja pemda yakni Mustikarini dan Fitriasari (2012), Sudarsana dan Raharjo (2013), Mangkunegara (2015) dan Budianto (2012).

Dari uraian di atas, maka disusunlah hipotesis pada penelitian ini, yaitu:

*H2 : Temuan audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.*

### **2.11.3 Pengaruh Kemandirian Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan**

#### **Pemerintah Daerah.**

Kemandirian pemerintah daerah diwujudkan dalam bentuk pendapatan asli daerah (PAD). PAD dan DAU merupakan sumber pendapatan daerah yang memiliki peran utama dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan

publik dan memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2001).

Tingkat kemandirian suatu daerah diukur dengan seberapa besar porsi PAD yang dihasilkan pemerintah daerah dibandingkan dengan total pendapatan yang diterimanya. Semakin besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan semakin mandiri daerah tersebut. Dengan semakin mandiri suatu daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Penelitian yang menghubungkan proksi PAD / Total pendapatan dengan kinerja pemda telah dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriasaki (2012), Sudarsana dan Raharjo (2013), serta Budianto (2012).

Dari uraian tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

*H3: Tingkat Kemandirian daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.*

#### **2.11.4 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja**

##### **Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Tujuan utama dari program kerja pemda adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang baik harus didukung oleh aset yang baik pula. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, Semakin besar ukuran pemerintah daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah aset pemda, maka diharapkan akan semakin tinggi kinerja pemda tersebut (Mustikarini dan Fitriasaki, 2012).

Sumarjo (2010) menjelaskan bahwa pelayanan yang baik dapat diberikan pemda jika didukung dengan aset yang baik pula. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat. pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar akan dituntut untuk memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan pemerintah daerah yang kecil ukurannya. Sumarjo (2010), Mustikarini dan Fitriasisari (2012) serta Budianto (2012) menyimpulkan bahwa ukuran pemda dengan proksi total aset berpengaruh positif terhadap kinerja pemda kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini juga didukung oleh penelitian Mangkunegara (2015) yang menyimpulkan bahwa total aset berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dari uraian tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

*H4 : Ukuran Pemda berpengaruh positif dan signifikan terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Gambaran Umum Objek**

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah provinsi di Indonesia yang menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan telah diaudit oleh BPK. Kemudian LKPD dan LHP dianalisis hubungannya dengan skor kinerja pemda yang diperoleh dari hasil EKPPD Kementerian Dalam Negeri. Data opini audit dan temuan audit diperoleh dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK pada periode Tahun 2010 -2014, sedangkan untuk data tingkat kemandirian dan ukuran pemda menggunakan data keuangan pemda pada Dirjen Perimbangan Keuangan Negara (DJPKN) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Nilai skor kinerja pemda diperoleh melalui data hasil EKPPD yang dipublikasikan oleh Kementerian Dalam Negeri pada periode Tahun 2010-2014.

#### **3.2 Jenis Data dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari opini dan temuan audit atas LKPD yang telah diperiksa oleh BPK serta dicantumkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK, laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit pada periode tahun 2009 sampai dengan 2013, serta hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah oleh

Kemendagri periode tahun 2010 sampai dengan 2014.

Cara pemerolehan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mencari data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ke berbagai media yang menyajikan data tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah daerah, data statistik keuangan pemerintah provinsi oleh BPS, data keuangan pemerintah daerah pada Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK), Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK yang diperoleh dari portal resmi BPK-RI, serta nilai EKPPD Tahun 2010-2014 yang diperoleh dari portal resmi Kemendagri.

#### 2. Studi Kepustakaan

Hal ini dilakukan dengan tujuan memperoleh data dan informasi selain dari obyek penelitian. Dengan studi kepustakaan, diharapkan peneliti dapat menemukan landasan teori untuk dijadikan acuan dalam penelitian. Sumber studi kepustakaan adalah buku-buku, literatur-literatur, dan penelitian sebelumnya terkait kinerja pemerintah daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### **3.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini meliputi:

1. Hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah periode Tahun 2010- 2014.
2. Laporan keuangan pemerintah daerah tingkat provinsi pada periode tahun sebelumnya yakni periode Tahun 2009-2013.
3. Hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD provinsi berupa opini audit dan

temuan audit pada tahun anggaran sebelumnya berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Keuangan (IHPS) yang diterbitkan oleh BPK.

### **3.4 Variabel Penelitian**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

#### **3.4.1 Variabel Dependen**

Variabel dependen menurut Sugiyono (2013) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen atau variabel bebas. Penggunaan variabel dependen dalam penelitian ini didukung oleh penelitian Mustikarini dan Fitriasari (2012), Sudarsana dan Raharjo (2013), dan Budianto (2012), yakni menggunakan skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang berasal dari laporan hasil evaluasi pemeringkatan daerah berdasarkan LPPD Tahun 2010 sampai dengan 2014 oleh Kementerian Dalam Negeri. Adapun skor kinerja pemerintah daerah berada dalam *range* nilai 0-4 dengan kategori sebagai berikut:

- a) Skor 0 – 1 = Rendah;
- b) Skor 1 – 2 = Sedang;
- c) Skor 2 – 3 = Tinggi;
- d) Skor 3 – 4 = Sangat Tinggi.

#### **3.4.2 Variabel Independen**

Variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian ini meliputi opini audit, temuan audit, tingkat kemandirian dan ukuran pemda. Keempat variabel independen tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

a) Opini Audit

Opini yang diterbitkan oleh BPK atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah terdiri atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW), dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Variabel opini audit dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Opini WTP : diberi nilai lima (5)
- 2) Opini WTP-DPP : diberi nilai empat (4)
- 3) Opini WDP : diberi nilai tiga (3)
- 4) Opini TW : diberi nilai dua (2)
- 5) Opini TMP : diberi nilai satu (1)

b) Temuan Audit

Variabel temuan audit menggunakan proksi nilai temuan audit (rupiah) suatu pemda terhadap total APBD yang diperiksa (realisasi belanja daerah).

Penelitian sebelumnya yang telah menggunakan variabel temuan audit adalah Mustikarini dan Fitriyani (2012), Sudarsana dan Raharjo (2013), Mangkunegara (2015) dan Budianto (2012).

Temuan Audit: Nilai rupiah temuan / Total realisasi belanja daerah

c) Tingkat kemandirian Daerah

Tingkat kemandirian daerah diukur dengan seberapa besar porsi PAD yang dihasilkan pemda dibandingkan dengan total pendapatan yang diterimanya.

Semakin besar rasio PAD terhadap total pendapatan menunjukkan semakin mandiri pemda tersebut. Penelitian terdahulu yang menggunakan proksi

ukuran PAD dibanding total pendapatan daerah antara lain Sumarjo (2010), Mustikarini dan Fitriasaki (2012) serta Sudarsana dan Raharjo (2013).

Tingkat Kemandirian: Pendapatan asli daerah / Total pendapatan daerah

d) Ukuran Pemerintah Daerah

Dalam penelitian ini ukuran pemerintah daerah diproyeksikan dengan nilai total aset yang dimiliki pemerintah daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan nilai logaritma natural (Ln) dari total aset. Hal ini disebabkan besarnya aset pemda sangat beragam bahkan mempunyai variabilitasnya yang tinggi, sehingga dapat menyebabkan variasi nilai yang ekstrem. Penelitian yang menggunakan ukuran pemda dengan proksi total aset pemda telah dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriasaki (2012), Sudarsana dan Raharjo (2013), Mangkunegara (2015) dan Budianto (2012).

**Tabel 3.1 Ringkasan Variabel Penelitian**

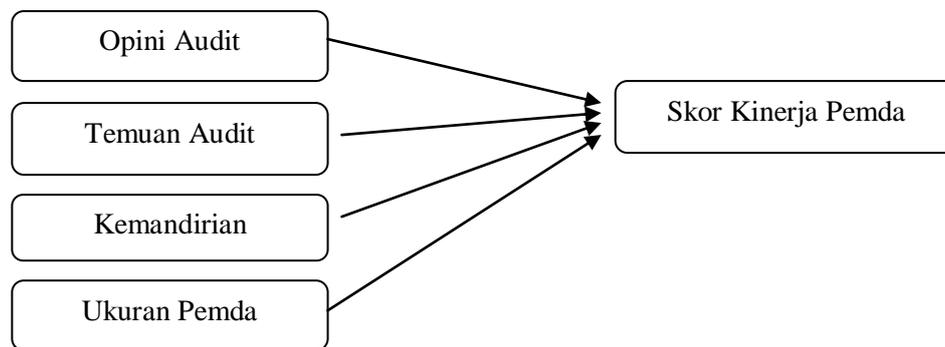
VARIABEL	KETERANGAN	UKURAN	ARAH
SKOR	Skor Kinerja Pemda	Skor Kinerja Pemda	
OPINI	Opini Audit	5 untuk WTP, 4 untuk WTP-DPP, 3 untuk WDP, 2 untuk TW; 1 untuk TMP	+
TEMUAN	Temuan Audit	Temuan audit (nilai rupiah)/Realisasi Belanja	-
MANDIRI	Tingkat Kemandirian	PAD/Total Pendapatan	+
ASET	Ukuran Pemda	Ln (total Aset Pemda)	+

Sumber: Diolah oleh peneliti

### 3.5 Model Penelitian

Secara sistematis kerangka penelitian dapat digambarkan dalam skema berikut:

**Gambar 3.1**  
**Kerangka Penelitian**



Model penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$SKOR_{it} = \alpha + \beta_1 (OPINI) + \beta_2 (TEMUAN) + \beta_3 (MANDIRI) + \beta_4 (ASET) + \varepsilon$$

Dimana :

SKOR = Skor evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

$\beta_0 - \beta_5$  = koefisien variabel independen

$\varepsilon$  = *Error term*

### 3.6 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dengan menggunakan regresi data panel (*panel pooled data*) untuk menganalisis pengaruh opini, temuan audit, tingkat kemandirian dan ukuran pemda terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Alat yang akan digunakan untuk pengujian statistik adalah *software* Eviews 8. Data dimasukkan ke dalam perangkat lunak Microsoft Excel 2007 dalam format *.xlsx*, lalu diimpor ke dalam *software* EViews 8 untuk diuji.

#### 3.6.1 Analisis Regresi

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan alat uji *eviews* 8. Temuan audit, tingkat kemandirian dan ukuran pemerintah daerah pada tahun *t* tidak secara langsung berpengaruh

terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tahun  $t$  tersebut melainkan diperlukan jeda waktu, sehingga akan dipakai model *lag*.

Menurut Nachrowi dan Usman (2006: 317) untuk mengestimasi model regresi data panel dapat digunakan tiga teknik uji regresi diantaranya dengan menggunakan *Ordinary Least Square (OLS)*/ *common effect*, *fixed effect* dan *random effect*. Dari ketiga teknik estimasi tersebut akan dipilih salah satu teknik yang paling tepat untuk mengestimasi regresi data panel. Pemilihan tersebut didasarkan atas uji-uji sebagai berikut:

### 3.6.1.1 Uji Statistik F (Uji Chow)

Uji ini berguna untuk memilih antara model OLS tanpa variabel *dummy (common effect)* dengan model *fixed effect*. Hal ini dilakukan dengan membandingkan antara  $F_{stat}$  dengan  $F_{tabel}$ , dengan hipotesis  $H_0$  menggunakan model *common effect* dan  $H_1$  menggunakan model *fixed effect*. Nilai  $F_{stat}$  akan diperoleh dari hasil uji chow dengan menggunakan aplikasi *evIEWS 8*, Sedangkan  $F_{tabel}$  dicari dengan cara menggunakan tabel F, ataupun dengan menggunakan alat bantu *Microsoft Excel*. Jika nilai Chow statistik ( $F_{stat}$ )  $>$   $F_{tabel}$ , maka hipotesis  $H_0$  ditolak yang artinya harus menggunakan model *Fixed Effect*. Dan jika nilai  $F_{stat}$   $<$   $F_{tabel}$ , maka hipotesis  $H_0$  diterima, yang artinya model *common effect (OLS)* yang akan digunakan untuk mengestimasi model data panel.

### 3.6.1.2 Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih antara metode *Fixed Effect* atau metode *Random Effect*. Hipotesis yang dibangun dalam Uji Hausman ini adalah  $H_0$  menggunakan *random effect* dan hipotesis alternatifnya menggunakan model *fixed*

*effect*. Statistik Uji Hausman ini mengikuti distribusi statistik *Chi Square* dengan *degree of freedom* sebanyak  $k$ , dimana  $k$  adalah jumlah variabel independen. Jika *Chi Square* hitung lebih tinggi dari *Chi Square* tabel dan *p-value* signifikan maka  $H_0$  ditolak, sehingga metode *Fixed Effect* yang lebih tepat untuk digunakan.

Namun apabila Jika *Chi Square* hitung lebih rendah dari *Chi Square* tabel dan *p-value* signifikan maka hipotesis  $H_0$  diterima, sehingga metode *Random Effect* lebih tepat digunakan untuk mengestimasi model regresi data panel.

### **3.6.2 Uji Asumsi Klasik**

Pengujian ini untuk memastikan bahwa dalam regresi yang digunakan tidak terdapat heteroskedastisitas, multikolinieritas, autokorelasi serta untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan terdistribusi normal.

#### **3.6.2.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah persebaran data berdistribusi normal atau tidak. Dimana yang diuji dalam model regresi adalah apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011). Terdapat beberapa cara yang digunakan dalam pengujian normalitas data ini, pada penelitian ini akan digunakan Uji Jaque Bera dan melihat probabilitasnya dari hasil pengujian sebaran residual. Dengan ketentuan untuk nilai probabilitas  $H_0$  dari uji ini adalah jika nilai probabilitas dibawah  $\alpha$  (0,05) maka data terdistribusi normal, sedangkan  $H_a$  nya adalah jika probabilitas diatas  $\alpha$ , maka data terdistribusi tidak normal.

#### **3.6.2.2 Uji Autokorelasi**

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan

pengganggu pada periode  $t-1$ . Problem autokorelasi akan muncul jika terjadi korelasi didalamnya. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering muncul pada data runtut waktu karena gangguan populasi cenderung mempengaruhi populasi yang sama pada periode berikutnya.

### 3.6.2.3 Uji Multikolinieritas

Pengujian ini bertujuan untuk melihat ada tidaknya hubungan linier antar variabel independen. Salah satu cara untuk melihat ada tidaknya adalah dengan membuat matrik korelasi antar variabel, jika nilai korelasi antar variabel berada pada nilai diatas 0,8 maka ada multikolinieritas. Sebaliknya jika berada dibawah 0,8 maka tidak ada multikolinieritas. Untuk melakukan pengujian ini bisa digunakan *software Eviews*, setelah itu akan didapatkan nilai korelasi antar variabel model. Selanjutnya dianalisis hubungan antar variabel independen, apakah terjadi multikolinieritas atau tidak.

### 3.6.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah pengujian apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual atau pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Salah satu asumsi yang harus dipenuhi agar taksiran parameter dalam model regresi linier bersifat BLUE maka  $var(u_i)$  harus sama dengan  $\sigma^2$  (konstan), atau

dengan kata lain semua residual atau *error* mempunyai varian yang sama atau disebut dengan homoskedastisitas. Sedangkan bila varian tidak konstan atau berubah-ubah disebut dengan heteroskedastisitas (Nachrowi, 2006: 109).

### **3.6.3 Pengujian Hipotesis**

Setelah melakukan pengujian untuk memilih diantara ketiga model yang akan digunakan untuk mengestimasi regresi data panel dan melakukan uji asumsi klasik, maka analisis dilanjutkan dengan pengujian hipotesis, diantaranya:

#### **3.6.3.1 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi atau  $R^2$  menunjukkan besar distribusi dari variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada diantara nol dan satu. Nilai *R-square* kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Bila nilai  $R^2$  mendekati satu menandakan bahwa variabel-variabel independen mendekati hubungan dengan variabel dependen, sehingga pengaruh model tersebut dapat dikatakan benar. Jadi semakin besar nilai  $R^2$  maka semakin bagus garis regresi yang terbentuk dan semakin kecil nilai dari  $R^2$ , maka semakin tidak tepat garis regresi tersebut mewakili data hasil observasi. Hal ini diperlukan karena dalam suatu penelitian atau observasi, perlu dilihat seberapa jauh model yang terbentuk dapat menerangkan variabel dependennya. Beberapa kegunaan koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengukur ketepatan suatu garis regresi yang ditetapkan terhadap kelompok data hasil observasi.

- b) Untuk mengukur proporsi varian dependen yang diterangkan oleh pengaruh linier dari variabel independen.

### **3.6.3.2 Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t)**

Uji t bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan antara  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ . Apabila  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  maka hipotesis alternatif yang menyatakan suatu variabel independen secara individu mempengaruhi variabel dependen dapat diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Namun jika  $t_{hitung}$  lebih rendah dari  $t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Selain membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ , uji t juga dapat dilakukan dengan melihat probabilitas yang terdapat dalam output komputer, jika probabilitas pada output komputer di bawah  $\alpha$  yang ditentukan maka koefisien regresi dianggap signifikan. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel opini, temuan audit, tingkat kemandirian serta ukuran pemerintah daerah secara terpisah (parsial) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat skor kinerja penyelenggaraan Pemda. Penelitian ini akan mengambil tingkat signifikansi 0,05.

### **3.6.3.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)**

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas dalam penelitian yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hipotesis yang ingin diuji adalah apakah semua

parameter dalam model sama dengan nol. Mekanisme yang digunakan untuk menguji hipotesis dari parameter dugaan secara bersama-sama (Uji F-statistik) :

$$\text{Hipotesis : } H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0$$

$H_a$  = minimal ada satu parameter dugaan ( $\beta$ ) tidak sama dengan nol

$$\alpha = 0,05$$

Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$ .

Bila nilai  $F_{hitung}$  lebih besar daripada  $F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya ada pengaruh dari seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Namun bila nilai  $F_{hitung}$  lebih rendah daripada  $F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya tidak ada pengaruh dari seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen berupa opini audit, temuan audit, tingkat kemandirian dan ukuran daerah terhadap skor kinerja pemda tingkat provinsi di Indonesia pada periode tahun 2010–2014. Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Opini audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia. Pemda yang memperoleh opini audit yang baik cenderung mendapatkan skor kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemda yang memperoleh opini audit yang tidak baik.
2. Temuan audit dengan proksi nilai rupiah temuan/total belanja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tingkat provinsi. Semakin besar nilai temuan audit suatu pemda maka akan semakin rendah skor kinerja penyelenggaraan pemda tersebut.
3. Tingkat kemandirian daerah dengan proksi PAD/total pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap skor kinerja pemerintah daerah pada tingkat provinsi di Indonesia. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian

sebelumnya yang menyimpulkan bahwa tingkat kemandirian daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap skor kinerja pemda.

4. Ukuran daerah dengan proksi nilai total aset pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah provinsi di Indonesia. Provinsi yang memiliki nilai aset yang lebih besar cenderung memperoleh skor kinerja EKPPD yang lebih tinggi.
5. Pemda yang memiliki opini audit yang baik serta nilai temuan audit yang kecil cenderung mendapat skor kinerja EKPPD yang tinggi pada tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Opini dan temuan audit mencerminkan kinerja keuangan daerah berdasarkan empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta efektivitas SPIP. Pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan empat kriteria tersebut untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*Good Corporate and Clean Government*).

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Terdapat keterbatasan yang dihadapi penulis terkait data penelitian, yaitu:

- a. Sampel yang digunakan adalah pemda tingkat provinsi tanpa melibatkan pemda tingkat kabupaten/kota, sehingga hasil penelitian belum menggambarkan kondisi pemda di Indonesia secara menyeluruh baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
- b. Variabel temuan audit hanya menggunakan proksi nilai rupiah temuan, sedangkan proksi jumlah kasus temuan audit tidak digunakan.

### 5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah agar dapat menjalankan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintahannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan opini hasil audit oleh BPK serta skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah juga diharapkan segera menindaklanjuti temuan audit BPK karena berpengaruh terhadap hasil audit dan penilaian kinerja pemda untuk tahun berikutnya.
2. Penelitian selanjutnya agar dapat menggunakan sampel berupa gabungan antara pemda pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga memperoleh hasil yang dapat menggambarkan pemda di Indonesia secara menyeluruh. Terkait dengan variabel temuan audit, penelitian selanjutnya agar menggunakan dua proksi pengukuran yakni nilai rupiah temuan dan jumlah kasus temuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arens, Alvin A. (2008). *Auditing and assurance services: an intergated approach*. Ed.12th. Pearson Education: USA.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 dan 2 Tahun 2010*. <http://www.bpk.go.id/>. diakses pada 15 Mei 2016.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 dan 2 Tahun 2011*. <http://www.bpk.go.id/>. diakses pada 15 Mei 2016.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 dan 2 Tahun 2012*. <http://www.bpk.go.id/>. diakses pada 15 Mei 2016.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 dan 2 Tahun 2013*. <http://www.bpk.go.id/>. diakses pada 15 Mei 2016.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 dan 2 Tahun 2014*. <http://www.bpk.go.id/>. diakses pada 15 Mei 2016.
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2011-2014* <http://www.bps.go.id/>. Diakses tanggal 30 Mei 2016.
- Budianto, W. 2012. Pengaruh Opini, Temuan Audit dan Gender Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2008-2010. *Skripsi Sarjana*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>. Diakses tanggal 30 Mei 2016
- Fitriasari, Khairurizka, dan Martani. 2013. Tingkat Kesesuaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2010 Terhadap PP No. 3/2007. *Prosiding PESAT*, Volume 5 Oktober 2013, ISSN: 1858-2559.
- Garson, G. David. 2012. *Hierarchical Linier Modeling*, North Caroline State University, SAGE Publications, Inc.
- Gilardi, Fabrizio. 2001. Principal-agent models go to Europe: Independent regulatory agencies as ultimate step of delegation. *Paper presented at the ECPR General Conference, Canterbury (UK)*, 6-8 September 2001.

- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2011. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1): 53-64.
- Haning, J. 2005. *Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Otonom: "Langkah apa yang dapat diambil?"*. Kupang.
- Haris, Syamsuddin. 2005. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, LIPI Press, Jakarta.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Pranataningrum, R. A. 2012. Pengaruh Aspek Keuangan Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2008-2010. *Skripsi Sarjana*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Jensen M. C. & W. Meckling. 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*. 11(4): 5-50.

- Lane, Jan-Erik. 2003. Management and public organization: The principal-agent framework. *Working paper*. University of Geneva and National University of Singapore.
- Lembaga Administrasi Negara dan BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance: Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan*. Jakarta: LAN dan BPKP.
- Li, Yang., Stokes, Donald., Taylor, Stephen., Wong, Leon. 2009. Audit Quality, Earnings Quality and the Cost of Equity Capital.
- Mahsun, M. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM.
- Mangkunegara, Irfan. 2015. Pengaruh Karakteristik Keuangan Dan Hasil Pemeriksaan pada Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, Vol 1, No 2, Desember 2015, 141-155. BPK-RI.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- , 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : suatu sarana good governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* Vol. 2 No. 1 , Hal 1-17.
- Moe, T. M. 1984. The New Economics of Organization. *American Journal of Political Science* 28(5): 739:777.
- Mustikarini, Widya Astuti dan Fitriyasi, Debby. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin.
- Nachrowi, N. D. & Usman, H. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Sadjiarto, A. 2000. Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Volume 2 Nomor 2, 138–150.
- Sudarsana, Hafidh Susila dan Rahardjo, Shiddiq Nur. 2013. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, Volume 2, Nomor 4, September 2013, Halaman 1-13 ISSN: 2337-3806.
- Sumarjo, H. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi Sarjana*. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta.

Sugiyono. 2014. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.

Suwardi, A. 2011. Stata : LPM, LOGIT, dan PROBIT MODEL (Edisi 2011).  
Jakarta: Universitas Indonesia.

Wakhyudi. 2011. Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Ciawi: Pusdiklatwas BPKP.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan  
Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara  
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-  
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.